

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, IPM, PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN / KOTA JAWA TENGAH

Whisnu Adhi Saputra

Drs. Y Bagio Mudakir, MSP

**Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
2011**

Abstract

Poverty is a complex problem which is related with many kind of aspects like the rights for food, health, education, job, etc. To decrease the poverty needs support and collaboration of society and the government's serious efforts. The average rate of poverty in Central Java is relatively higher than other 6 provinces of Java, lying on first level between 2004-2008.

This study is aimed to analyze how and how much the influence of population variabel, GRDP, Human Development Index and unemployment to the rate of poverty in regency/city of Central Java. Regression model used is Ordinary Least Squares Regression by using a panel data using fixed effects approach. This study uses a dummy year as one of the variables. The use of dummy years in this study is to look at variations in poverty levels over time in Central Java.

The test result simultaneously shows that, totally, independent variable together can point it's influence to the rate of poverty. And R-squared value of 0.609 which means 60,9% rate of poverty variable can be explained by independent variable. While the rest, the 40%, explained by other factors outside of the model.

Research results show population variable positively and significantly influence the rate of poverty in Central Java, GRDP negatively and significantly influence the rate of poverty in Central Java, Human Development Index negatively and significantly influence the rate of poverty in Central Java and unemployment negatively and not significantly influence the rate of poverty in Central Java.

Keywords: rate of poverty, population, GRDP, Human Development Index and unemployment

A. Pendahuluan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. (www.bappenas.go.id)

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Menurut Pantjar Simatupang dan Saktyanu K (2003), Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Bappeda Jateng (2007), upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “*Grand Strategy*”. Pertama, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Ketiga, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. Kelima, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas.

Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai

penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 hingga tahun 2008 mengalami periode yang relatif baik karena mengalami tren yang menurun dari 20,49 persen di tahun 2005 menjadi 18,99 persen di tahun 2008, meskipun sempat mengalami kenaikan di tahun 2006 menjadi 22,19 persen. Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih yang paling tinggi dibanding dengan Provinsi lain di pulau Jawa. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Jawa Tengah masih berada dibawah garis kemiskinan, merupakan suatu kenyataan yang membuat kita prihatin karena seolah-olah kemiskinan itu tetap muncul dan merupakan bagian dari pembangunan, padahal pembangunan ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan bukan berjalan bersama-sama. Besarnya angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama jumlah penduduk, PDRB, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
4. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

B. Telaah Pustaka

I. Kemiskinan

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih

menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

II. Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

III. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Maltus (dikutip dalam Lincolin Arsyad, 1997) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsiten.

Menurut Maier (dikutip dari Mudrajat Kuncoro, 1997) di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.
3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

IV. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

V. Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB dalam konteks nasional dan PDRB dalam konteks regional, hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Untuk itu dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif, yang mampu menangkap tidak saja perkembangan ekonomi akan tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia. Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia
- dan perluasan kebebasan memilih.
- Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- Membentuk satu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini:
- Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup;
- Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi; dan
- Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP).

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai berikut :

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0.

VI. Pengangguran

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.
2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (Lincoln Arsyad, 1997)

C. Metode Penelitian

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variable dependen, sedangkan variable independen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008.

Definisi Operasional

1. Tingkat Kemiskinan (KM)

Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Garis kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan jumlah penduduk miskin ditentukan dua kriteria yaitu pengeluaran konsumsi perkapita per bulan yang setara dengan 2100 kalori perkapita per hari dan nilai kebutuhan minimum komoditi bukan makanan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk total kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

2. Jumlah Penduduk (PD)

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Jawa Tengah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data yang digunakan adalah jumlah penduduk tahun 2005 – 2008 (dalam satuan jiwa).

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. PDRB yang dimaksud adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam juta rupiah tahun 2005 – 2008 (dalam satuan rupiah).

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur

pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Data yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

5. Tingkat Pengangguran (PG)

Pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah orang yang masuk angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan pekerjaan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Data yang digunakan untuk melihat pengangguran adalah perbandingan antara pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk di Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data tingkat kemiskinan, data jumlah penduduk, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data tingkat pengangguran. Data tersebut juga merupakan data antar ruang (*cross section*) dan data runtun waktu (*time series*), yaitu data secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variable tertentu. Dalam hal ini data yang digunakan berupa tahun periode 2005-2008.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang diambil adalah data

seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota. Tahun yang dipilih adalah tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 hal ini dikarenakan data *time series* adalah sebanyak 4 tahun sedangkan data antar ruang (*cross section*) diambil dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data *time series* dan data *cross section* atau sering disebut dengan data panel.

Metode Regresi

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel Jumlah Penduduk (PD), variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel tingkat pengangguran (PG) dan *dummy* tahun 2006, 2007, dan 2008 (D2,D3,D4) terhadap tingkat kemiskinan (KM) digunakan asumsi *FEM* yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Bentuk model *fixed effect* adalah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep. Ketika variabel *dummy* digunakan untuk mengestimasi *fixed effect*, maka persamaan tersebut disebut sebagai *Least Square Dummy Variabel (LSDV)*.

Model fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui kemiskinan di Jawa Tengah yaitu:

$$KM = \beta_0 + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 PG_{it} + \beta_5 D_2 + \beta_6 D_3 + \beta_7 D_4 + \mu_i$$

dimana:

KM = Tingkat kemiskinan dalam persen.

PD = variabel Jumlah Penduduk dalam jiwa.

PDRB = variabel PDRB harga konstan 2000 dalam rupiah.

IPM = variabel IPM

PG = variabel tingkat pengangguran dalam persen.

D2 = *dummy* tahun 2006

D3 = *dummy* tahun 2007

D4 = *dummy* tahun 2008

i = unit *cross section*.

t = unit *time series*.

β_0 = konstanta.

β = koefisien.
 μ = residual

Karena terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghozali, 2005) adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari adanya heteroskedastisitas
- b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas
- c. Mendekatkan skala data

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk semilog linear (*semi-log*). Dimana *semi-log* mempunyai beberapa keuntungan diantaranya (1) koefisien-koefisien model semilog mempunyai inter pretasi yang sederhana, (2) model semilog sering mengurangi masalah statistik umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas, (3) model semilog mudah dihitung. Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

$$KM = \beta_0 + \beta_1 \text{LOG}(\text{PD})_{it} + \beta_2 \text{LOG}(\text{PDRB})_{it} + \beta_3 (\text{IPM})_{it} + \beta_4 (\text{PG})_{it} + \beta_5 D_2 + \beta_6 D_3 + \beta_7 D_4 + \mu_i$$

D. Hasil dan Pembahasan

Letak Geografis dan Administratif Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis letaknya antara 5⁰40' dan 8⁰30' Lintang Selatan dan antara 108⁰30' dan 110⁰30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan adalah 226 km (tidak termasuk Karimunjawa).

Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3.254.412 hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Luas wilayah tersebut terdiri dari 991 ribu hektar (30,45 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,55 persen) bukan lahan sawah.

Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Kota Semarang, secara administratif terbagi dalam 35 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) dengan 565 kecamatan yang meliputi 7872 desa dan 622 kelurahan. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah berbatasan oleh :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Jawa Barat

Gambar 1
Peta administratif Jawa Tengah



Analisis Data dan Pembahasan

Analisi Deteksi Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil regresi dari model yang digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik, guna mengetahui apakah model tersebut dianggap relevan atau tidak.

Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Atau multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Tetapi perbedaan ini jarang diperhatikan dalam praktek, dan multikolinearitas berkenaan dengan kedua kasus tadi. Dapat dilihat bahwa dari matriks korelasi pairwise tidak ada yang bernilai diatas 0,8 yang menunjukkan adanya perfect multicollinearity. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas yang cukup serius pada persamaan tersebut.

Tabel 1
Deteksi *Pairwise*

Variabel	KM	PD	PDRB	IPM	PG	D2	D3	D4
KM	1.000000	0.370608	-0.306833	-0.685609	-0.417838	0.123782	-0.009204	-0.107801
PD	0.370608	1.000000	0.465790	-0.452941	-0.147793	-0.014308	-0.005799	0.003700
PDRB	-0.306833	0.465790	1.000000	0.243460	0.165359	-0.017417	0.014435	0.047669
IPM	-0.685609	-0.452941	0.243460	1.000000	0.458990	-0.044865	0.074489	0.186040
PG	-0.417838	-0.147793	0.165359	0.458990	1.000000	0.009826	0.151810	0.068229
D2	0.123782	-0.014308	-0.017417	-0.044865	0.009826	1.000000	-0.333333	-0.333333
D3	-0.009204	-0.005799	0.014435	0.074489	0.151810	-0.333333	1.000000	-0.333333
D4	-0.107801	0.003700	0.047669	0.186040	0.068229	-0.333333	-0.333333	1.000000

Deteksi Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2005), deteksi autokorelasi digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi terjadi hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Salah satu deteksi formal untuk mendeteksi autokorelasi adalah Breusch-Godfrey atau dengan nama lain deteksi *Langrange Multiplier* (LM). Berikut adalah hasil deteksi autokorelasinya :

Tabel 2
Deteksi Langrange-Multiplier (LM)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test :	
F-statistic	1.902714
Obs*R-squared	3.981601

Dengan $n = 140$ dan $k = 7$, maka diperoleh degree of freedom (df) = 133 ($n-k$), dan menggunakan $\alpha = 5$ persen diperoleh nilai χ^2 tabel sebesar 160,915. Dibandingkan dengan nilai Obs*R-squared hasil deteksi Langrange yaitu sebesar 3.981601 maka nilai Obs*R-squared deteksi *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* lebih kecil dibandingkan nilai χ^2 tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan tersebut bebas dari gejala autokorelasi.

Deteksi Heterokedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua *disturbance term* memiliki varians yang sama atau tidak (Gujarati, 2003). Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan deteksi white yang tersedia dalam program Eviews 4.1. Hasil deteksi White pada persamaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Deteksi White

Heteroskedasticity Test: White	
F-statistic	0.598349
Obs*R-squared	6.846818

Dengan $n = 140$ dan $k = 7$, maka diperoleh degree of freedom (df) = 133 ($n-k$), dan menggunakan $\alpha = 5$ persen diperoleh nilai χ^2 tabel sebesar 160,915. Dibandingkan dengan nilai Obs*R-squared hasil deteksi *White Heteroskedasticity* yaitu sebesar 6.846818 maka nilai Obs*R-squared uji *White Heteroskedasticity* lebih kecil dibandingkan nilai χ^2 tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Deteksi Normalitas

Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan pengujian normalitas dengan uji *Jarque Berra* atau *J-B test*. Jika nilai $J - B$ hitung $>$ $J - B$

tabel, atau nilai probability Obs*R Squared lebih besar dari taraf nyata 5 persen, maka dinyatakan bahwa residual U_t terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.

Dengan $n = 140$ dan $k = 7$, maka diperoleh *degree of freedom* (df) = 133 ($n-k$), dan menggunakan $\alpha = 5$ persen diperoleh nilai χ^2 tabel sebesar 160,915. Dibandingkan dengan nilai Jarque Bera sebesar 1,160721 dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas gangguan μ_1 regresi tersebut terdistribusi secara normal karena nilai Jarque Bera lebih kecil dibanding nilai χ^2 tabel.

Analisi Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, tingkat pengangguran, dan Dummy Tahun terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005- 2008.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan Program Eviews 4.1 maka didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Rgresi Utama

Variabel	Persamaan	
	Coefficient	Prob.
LOG(PD)	7.056161	0.0000
LOG(PDRB)	-5.805408	0.0000
(IPM)	-0.950164	0.0001
(PG)	-0.249998	0.1651
D2	2.950599	0.0080
D3	2.205434	0.0529
D4	1.595044	0.1638
Jumlah Observasi	140	
R-squared	0.6092180	
Adjusted R-squared	0.588494	
F-statistic	29.39770	

Keterangan :

PD : Jumlah Penduduk

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

PG : Tingkat Pengangguran

D : *dummy* Tahun

Pengujian Kriteria Statistik

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hasil regresi menunjukkan pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, dan *Dummy* Tahun terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 diperoleh nilai R^2 sebesar 0.6092180. Hal ini berarti sebesar 60 persen variasi tingkat kemiskinan (KM) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi tujuh variabel independennya yakni variabel jumlah penduduk (PD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran (PG) dan *Dummy* Tahun 2006, 2007, dan 2008 (D2, D3, D4). Sedangkan sisanya sebesar 40 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model

Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dari regresi pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, dan *Dummy* Tahun terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 yang menggunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha = 5$ persen), dengan *degree of freedom for denominator* sebesar 133. Dimana $(n - k) = (140 - 7 = 133)$, dan *degree of freedom for nominator* sebesar 6 ($k - 1 = 6$), maka diperoleh F-tabel sebesar 2,17. Dari hasil regresi pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, dan *Dummy* Tahun terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun

2005 – 2008 diperoleh F-statistik sebesar 29.39770 dan nilai probabilitas F-statistik 0,000000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ($F_{hitung} > F_{tabel}$).

Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam regresi pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, dan *Dummy* Tahun terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, dengan $\alpha = 5$ persen dan *degree of freedom* (df) = 133 ($n-k = 140 - 7$), maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,978.

Tabel 5
Nilai t-statistik

Variabel	t-statistik	t-tabel ($\alpha = 5\%$)
LOG_PD (Jumlah Penduduk)	5.123030	1,978
LOG_PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	-5.460030	1,978
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	-3.956894	1,978
PG (Tingkat Pengangguran)	-1.395769	1,978
D2 (<i>Dummy</i> Tahun 2006)	2.692979	1,978
D3 (<i>Dummy</i> Tahun 2007)	1.953668	1,978
D4 (<i>Dummy</i> Tahun 2008)	1.400222	1,978

Dari Tabel 5 terlihat bahwa hasil regresi pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, dan *Dummy* Tahun terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 dapat disimpulkan bahwa pada taraf 95 persen ($\alpha = 5$ persen) variabel Jumlah Penduduk (PD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan *Dummy* Tahun 2006, 2007, dan 2008 (D1, D2, D3) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2005 – 2008, sedangkan variabel tingkat pengangguran (PG) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2005 – 2008.

Dalam regresi pengaruh pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, dan *Dummy* Tahun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008 dengan menggunakan metode panel data diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel dalam penelitian dengan persamaan sebagai berikut :

$$KM = 157.59 + 7.05*LOG(PD) - 5.80*LOG(PDRB) - 0.95*IPM - 0.24*PG + 2.95*D2 + 2.20*D3 + 1.59*D4$$

Interpretasi dari penelitian pengaruh pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, dan *Dummy* Tahun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008 adalah sebagai berikut :

Jumlah Penduduk (PD)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Jumlah Penduduk (PD) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan Jumlah Penduduk sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 7.05 persen. .

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5.80 persen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap output total pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0.95 persen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.

Tingkat Pengangguran (PG)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Tingkat Pengangguran (PG) memberikan pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan Tingkat Pengangguran sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.24 persen namun hasil ini tidak signifikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan.

Pembahasan

Jumlah Penduduk (PD)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Jumlah Penduduk (PD) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Todaro (2000) yang berpendapat bahwa besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hal itu dibuktikan dalam perhitungan indeks Foster Greer Thorbecke (FGT), yang mana apabila jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat. Hasil ini juga sependapat dengan penelitian

dari Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan metode panel data mengimplikasikan bahwa jumlah penduduk berhubungan positif dengan kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang (Sadono Sukirno, 2000).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan pada, hasil penelitian ini sependapat dengan pendapat dari Yani Mulyaningsih (2008) bahwa indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Tingkat Pengangguran (PG)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa Tingkat Pengangguran (PG) memberikan pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang masuk

dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selain itu pastilah juga ada yang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai pekerjaan paruh waktu (*Part Time*) namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Dummy Tahun

Dalam menginterpretasikan hasil regresi data panel metode LSDV menggunakan variabel *dummy*, apabila variabel *dummy* menunjukkan tanda positif dan signifikan secara statistik ini menunjukkan bahwa pola tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008 berbeda dengan pola tingkat kemiskinan pada Kab/Kota di Jawa Tengah yang dijadikan *benchmark* (yaitu tahun 2005), dikarenakan penelitian ini menggunakan data panel *stacked by date* yang menjadi basis yaitu tahun dasar (tahun 2005). Signifikannya variabel D2, D3, dan D4 yaitu observasi dalam kurun waktu 2006, 2007, dan 2008 menunjukkan bahwa pola tingkat kemiskinan dalam kurun waktu tahun 2005 berbeda dengan pola tingkat kemiskinan daerah pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Di tahun 2006 variabel *dummy* memiliki nilai koefisien parameter sebesar 2.950599, di tahun 2007 variabel *dummy* memiliki nilai koefisien parameter sebesar 2.205434, dan di tahun 2008 variabel *dummy* memiliki nilai koefisien parameter sebesar 1.595044. Sementara angka positif pada koefisien *dummy* menunjukkan bahwa variabel *dummy* tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan *benchmark* (yaitu tahun 2005).

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh variabel jumlah penduduk, PDRB, IPM, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2008. Berdasar uraian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel jumlah penduduk mempunyai tanda positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis, tanda positif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya. Selain itu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan masalah-masalah baru baik dari segi sosial ataupun ekonomi.
2. Variabel Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai tanda negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis, tanda negatif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi PDRB, maka akan menurunkan tingkat kemiskinannya.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai tanda negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis, tanda negatif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi IPM, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Nilai IPM yang dalam perhitungannya mencakup indikator pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan suatu daerah.
4. Variabel pengangguran mempunyai tanda negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis serta teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dari penelitian ini. Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selain itu pastilah juga ada yang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai pekerjaan paruh waktu (*Part Time*) namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah disebabkan karena pengaruh jumlah penduduk yang terus meningkat yang tidak diikuti dengan kebijakan pemerintah dalam upaya menekan angka kelahiran. Namun tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dapat ditekan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia yang dapat dilakukan dengan meningkatkan sarana prasarana baik dari segi pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Saran

1. Diperlukan solusi jumlah penduduk yang besar dari tahun ke tahun, misalnya dengan pembangunan berwawasan kependudukan, pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Artinya bahwa pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan pembangunan infrastrukturnya semata. .
2. Dari hasil penelitian, didapat bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sehingga hendaknya ke depan peningkatan PDRB ini dapat diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruhan golongan masyarakat, serta dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki.
3. Indikator IPM yang menggambarkan kualitas hidup manusia yang terdiri dari ukuran pendidikan, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, sangat penting terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, maka pemerintah perlu merancang suatu program yang berkesinambungan agar dapat memacu naiknya nilai IPM dengan mempermudah akses pendidikan dan kesehatan terutama bagi kaum miskin .
4. Pengangguran berdasarkan hasil penelitian berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, tetapi dengan hasil tersebut diharapkan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih banyak lagi melakukan perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru yang bersifat padat karya serta menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti *home industry*. Karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran terbuka, yang mana di dalamnya terdapat golongan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan sedang dalam tahap menyiapkan usaha atau mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja yang dimasukkan dalam golongan pengangguran. Sehingga pentingnya perluasan kesempatan kerja yang bersifat padat karya dan peningkatan sektor informal untuk menekan kemiskinan di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Perlunya penggunaan data *time series* yang lebih panjang untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adit Agus P. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan (Studi Kasus 35 kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Undip. Semarang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 2007. *Dukungan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberantasan Kemiskinan*.
http://p3b.bappenas.go.id/Loknas_Wonosobo/Content/docs/materi/2-Bappeda%20Jateng.pdf
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah Dalam Angka berbagai edisi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- _____. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah berbagai edisi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- _____. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah berbagai edisi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Gujarati, Damodar. 1995, *Ekonometri Dasar Terjemahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____, 2003, *Basic Econometrics Fourth Edition*, Penerbit United States Military Academy, New York.
- Deny Tisna A., 2008, *Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesiatahun 2003-2004*. Kumpulan Skripsi UNDIP: Semarang.
- Dian Octaviani, 2001, *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*, Media Ekonomi, Hal. 100-118, Vol. 7, No. 8.
- Firmansyah. *Modul Praktek Regresi Data Panel dengan Eviews 6*. Semarang : Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Undip.
- Hadi Sasana, 2006, *Analisis Dampak Transfer Pemerintah Terhadap Kinerja Fiskal di Kab/Kota di Provinsai Jateng Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2, Hal. 223-242.
- Hermanto S., Dwi W., 2006, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia : Proses Pemerataan dan Kemiskinan*, Direktur Kajian Ekonomi, Institusi Pertanian Bogor.
- Imam Ghozali, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Lincoln Arsyad, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Metode Kuantitatif*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003, *Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan*, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Hal. 191 - 324, Vol. 51, No. 3
- Rasidin S., Bonar S., 2009, *Dampak Infestasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*, Prisma, Hal. 17 - 31, No. 1.
- Sadono Sukirno, 2000, *Makro Ekonomi Modern*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumitro Djojohadikusumo, 1995, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tulus H. Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Usman,dkk. 2009, *Analisis Determinan Kemiskinan sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal*, Fakultas Ekonomi : Intitusi Pertanian Bogor.
- Winarno Wahyu., 2007, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*, UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Yani Mulyaningsih. 2008, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap peningkatan Pembangunan Manusia Dan Pengurangan Kemiskinan*. Progam Pasca Sarjana.